

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai prasyarat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang demokratis, pendidikan yang berkualitas tidak hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik tetapi perlu dikembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

Dalam kaitan ini muncullah salah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Kondisi tersebut dalam memasuki era MBS perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “masyarakat sekolah” yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Untuk terciptanya suatu sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002). MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu , efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah (Mulyasa 2014:11).

Pada sisi lain pendidikan dimaksudkan untuk memposisikan diri sebagai tempat bagi mereka untuk mengembangkan diri brdasar keunikan potensi dan kepentingan masing–masing (Schofield dalam Sarjono, 2014: 30).

Pemberian otonomi pendidikan menurut pendekatan manajemen akan lebih kondusif di sekolah karena dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif. Bentuk otonomi pendidikan secara nyata bisa berupa partisipasi masyarakat dalam usaha mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri sebagai tempat peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, maka Komite Sekolah dituntut mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian

peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Salah satu peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan, Komite sekolah harus mampu memberikan masukan-masukan dan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan sekolah. Hal yang sering kali harus dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah antara lain kurikulum dan program pengajaran. Selain itu untuk menuju pendidikan masa depan yang berkualitas hendaknya melaksanakan: (1) Manajemen pendidikan yang berbasis sekolah, (2) Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (3) Mengadakan percepatan program bagi anak-anak berbakat atau akselerasi, (4) Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta (5) Melaksanakan pembelajaran yang konstruktif (Sarjono, 2014 : 60).

Hal ini perlu diperhatikan agar kemampuan dan ketrampilan peserta didik relevan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan, perlu adanya suatu manajemen kurikulum dan program pengajaran yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Selain itu juga diharapkan dengan manajemen kurikulum dan program pengajaran, mampu mengembangkan program pendidikan tertentu yang sesuai dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya karena pendidikan yang didapat di bangku sekolah nantinya akan diterapkan langsung dalam kehidupannya. Jadi sebisa mungkin kurikulum dan program pengajaran selalu disesuaikan dengan keadaan dan situasi lingkungan.

Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen

program pengajaran. Manajemen atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu manajemen tenaga pendidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Salah satu syarat yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal adalah dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung atau pun tidak langsung yang dipergunakan di dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.

Beberapa fakta tentang Komite Sekolah:

1. Di sebagian daerah, sosialisasi tentang peran komite sekolah kepada masyarakat belum efektif

2. Di beberapa sekolah, komite sekolah hanya berperan sebagai alat kelengkapan sekolah
3. Komite sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpul dana untuk membiayai program sekolah
4. Tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah belum dilaksanakan secara optimal
5. Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi komite sekolah belum berimbang. (Haryadi, dkk 2006:52).

Komite Sekolah SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang sebagai perwujudan dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah mempunyai peranan yang cukup besar dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan pendidikan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Dimana program-program yang diajukan oleh pihak sekolah, Komite Sekolah mempunyai wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang dilakukan dalam rapat-rapat dalam menyusun anggaran, penyusunan program kerja dan melakukan pengalangan dana. Wujud kewenangan komite disini berupa sarana atau pertimbangan dalam penentuan dan perencanaan program, memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan program, dan melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan program kebijakan.

Komite Sekolah di SMP Islam Sudirman Ambarawa berupaya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat baik perorangan/organisasi maupun dunia usaha dan pemerintah

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian komite menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Disini komite memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Komite Sekolah juga berupaya mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Misalnya dengan melakukan penggalangan dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Begitu gigihnya kerja komite sekolah sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Ambarawa khususnya dan masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya. SMP Islam Sudirman Ambarawa menjadi sekolah yang mengharumkan nama Kecamatan Ambarawa dengan berbagai prestasi yang telah di raih dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Ini terjadi karena kerjasama dari berbagai pihak mulai dari siswa, orang tua wali siswa, guru, pegawai, kepala sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini adalah komite sekolah yang terjalin dengan begitu baik.

Peran komite sekolah yang begitu penting di dalam menjalankan tugasnya diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah peran komite sekolah dalam penyusunan kebijakan sekolah di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, kiranya tepat jika dilakukan penelitian dengan judul “*Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Sekolah di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah :
Bagaimana karakteristik peran Komite Sekolah dalam penerapan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang?.

Adapun fokus penelitian ini dapat dijabarkan dalam sub fokus sebagai berikut

1. Bagaimana karakteristik peran Komite Sekolah dalam perencanaan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana karakteristik peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana karakteristik peran Komite sekolah dalam pengawasan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan cermat terhadap peran Komite Sekolah dalam penerapan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa Kabupaten Semarang.

Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan peran komite sekolah terhadap perencanaan program kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa.
2. Mendiskripsikan peran komite sekolah dalam pelaksanaan kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa.

3. Mendiskripsikan peran komite sekolah dalam pengawasan program kebijakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Proses dan hasil penelitian ini dapat merupakan pengembangan penelitian komite sekolah yang mempunyai peran dan fungsi meningkatkan keikutsertaan masyarakat, khususnya peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bahan masukan kepada Dewan Pendidikan dalam rangka pembinaan terhadap komite sekolah berkaitan dengan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di satuan pendidikan.
- b. Bahan masukan kepada kepala sekolah dalam rangka peningkatan fungsi manajemen berkaitan dengan kerjasamanya dengan komite sekolah.

E. Daftar Istilah

Istilah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. MBS adalah salah satu wujud reformasi pendidikan yang bisa juga disebut suatu pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah-sekolah dikelola sepenuhnya oleh kepala sekolah dan guru-guru sebagai pengelola dan pelaksana pendidikan pada setiap sekolah yang tidak terpisahkan dengan lingkungan masyarakatnya.

2. Komite sekolah adalah badan mandiri sebagai tempat peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
3. Kebijakan sekolah merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis sekolah yang dijabarkan dari visi, misi sekolah, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan sekolah untuk kurun waktu tertentu.
4. Karakteristik komite merupakan sifat khas yang ada di lembaga tersebut atau sifat khusus yang membedakan dengan lembaga lain